

KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA DALAM PENGAMANAN PERBATASAN MELALUI PATROLI TERKOORDINASI DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023-2024

Ery Setiawan¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This study examines the bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia in securing the land border in West Kalimantan through coordinated patrols between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Malaysian Army (TDM) during 2023–2024. As a strategic area vulnerable to non-traditional threats such as smuggling, human trafficking, and illegal border crossings, border management requires a collaborative cross-border approach. Based on the researcher's direct experience in the Border Security Task Force (Satgas Pamtas), this study analyzes the dynamics of patrol implementation, its effectiveness in maintaining stability, and the operational challenges encountered. Using theoretical frameworks of international cooperation, non-traditional security, and border security, the findings show that coordinated patrols enhance strategic trust, reduce border violations, and strengthen defense diplomacy between the two countries. However, effectiveness is still influenced by technical factors such as differences in SOPs, limited infrastructure, and lack of technological integration and community involvement. This study recommends strengthening institutional coordination, utilizing surveillance technology, and adopting community-based approaches to improve the effectiveness of border security cooperation in the future.

Keywords: Coordinated Patrols, Indonesia–Malaysia Border, Non-Traditional Security, Defense Diplomacy, Bilateral Cooperation

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia dalam pengamanan wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat melalui mekanisme patroli terkoordinasi antara TNI dan Tentera Darat Malaysia (TDM) pada tahun 2023–2024. Sebagai wilayah strategis yang rawan terhadap ancaman non-tradisional seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan perlintasan ilegal, pengelolaan perbatasan memerlukan pendekatan kolaboratif lintas negara. Melalui pengalaman langsung peneliti dalam Satgas Pamtas, penelitian ini mengkaji dinamika implementasi patroli, efektivitasnya dalam menjaga stabilitas, serta tantangan operasional yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan teori kerja sama internasional, keamanan non-tradisional, dan keamanan perbatasan, ditemukan bahwa patroli terkoordinasi mampu meningkatkan kepercayaan strategis, menurunkan angka pelanggaran, serta memperkuat diplomasi pertahanan kedua negara. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor teknis seperti perbedaan SOP, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya integrasi teknologi serta pelibatan masyarakat. Studi ini merekomendasikan penguatan koordinasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi pengawasan, dan pendekatan berbasis komunitas guna meningkatkan efektivitas kerja sama keamanan perbatasan di masa depan.

Kata Kunci: Patroli Terkoordinasi, Perbatasan Indonesia–Malaysia, Keamanan Non-Tradisional, Diplomasi Pertahanan, Kerja Sama Bilateral

PENDAHULUAN

Perbatasan negara merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam konsep kedaulatan dan eksistensi suatu negara. Keberadaan garis batas tidak sekadar menjadi pemisah teritorial, namun juga memiliki makna simbolik dan strategis sebagai representasi keutuhan wilayah, legitimasi hukum internasional, serta refleksi dari integritas nasional. Dalam konteks geografis dan geopolitik, wilayah perbatasan juga berperan sebagai *buffer zone* dan *frontline* pertahanan negara, sekaligus menjadi jembatan interaksi sosial, ekonomi, dan budaya lintas negara. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi juga menjadi bagian dari strategi diplomasi dan tata kelola keamanan nasional secara menyeluruh.

Perbatasan negara merupakan garis demarkasi yang krusial bagi kedaulatan dan integritas teritorial sebuah negara. Wilayah perbatasan seringkali menyimpan kompleksitas permasalahan yang serius dari negara-negara yang berbatasan. Di wilayah perbatasan ini juga, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat penting dan strategis di suatu negara. Hal ini diakibatkan wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu negara. Secara letak geografis, posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak diantara dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga. Di kawasan perbatasan darat Republik Indonesia (RI) berbatasan dengan 3 negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste. Sebagai negara kepulauan (*Archipelagic state*), Republik Indonesia mempunyai batas maritim berupa batas laut wilayah (teritorial), batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan 10 negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timor Leste dan Australia.

Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, menjadikan Indonesia memiliki batas wilayah darat dan laut yang luas dan kompleks. Indonesia berbatasan darat langsung dengan tiga negara, yaitu Malaysia (di Pulau Kalimantan), Papua Nugini (di Pulau Papua), dan Timor Leste (di Pulau Timor). Di sisi lain, batas maritim Indonesia bersinggungan dengan sepuluh negara, antara lain India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Kompleksitas batas ini menuntut sistem manajemen perbatasan yang cermat dan terintegrasi, baik dalam aspek pertahanan maupun diplomasi bilateral dan regional.

Salah satu kawasan perbatasan yang memiliki dinamika menarik dan tantangan tersendiri adalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan, khususnya di provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Wilayah geografis Provinsi Kalbar yang terletak di sepanjang garis perbatasan negara antara Republik Indonesia dengan Malaysia meliputi 5 Kabupaten. Yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Bengkayang, dan Sambas, sedangkan negara Malaysia meliputi Negara Bagian Sarawak (Lubok Antu District) dan Sarawak. Dengan panjang garis perbatasan 976,63 km, berdasarkan ketentuan hukum tentang batas-batas wilayah negara sebagaimana ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak. Khususnya di wilayah Kalimantan, Republik Indonesia berbagi batas darat sepanjang hampir 2.000 km dengan Malaysia, tepatnya dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah. Provinsi

Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia melalui lima kabupaten, yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Bengkayang, dan Sambas. Dari sisi geospasial, Kalimantan Barat memiliki panjang garis batas darat dengan Malaysia sepanjang $\pm 976,63$ km, menjadikannya salah satu kawasan perbatasan terpanjang dan paling aktif di Indonesia.

Wilayah Kalimantan Barat ini, merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki arti penting dalam konteks kedaulatan, keamanan nasional, serta hubungan bilateral antar negara. Memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan Negara RI. Wilayah ini kerap menghadapi berbagai tantangan keamanan seperti Penyelundupan, perlintasan ilegal, perdagangan narkoba lintas batas, hingga potensi konflik antarwarga perbatasan. Oleh karena itu pengamanan perbatasan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pertahanan dan diplomasi Indonesia.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia–Malaysia, sejarah panjang interaksi kedua negara telah berlangsung sejak masa prakemerdekaan. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, dan hubungan diplomatik formal pun segera terjalin. Meski hubungan ini tidak selalu berjalan mulus dalam sejarahnya sempat diwarnai konflik militer seperti Konfrontasi tahun 1963 namun secara umum, hubungan kedua negara terus berkembang secara dinamis dan konstruktif, terutama pasca-reformasi dan era keterbukaan regional. Hubungan bilateral ini tidak hanya bersifat formal di tingkat negara, tetapi juga melekat secara kultural, etnis, dan historis, mengingat kedekatan budaya dan keturunan antara masyarakat di Kalimantan dan Sarawak.

Namun demikian, kedekatan geografis dan kultural ini justru seringkali menyimpan potensi tantangan. Wilayah perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak menyimpan kompleksitas sosial, ekonomi, dan keamanan yang khas. Kegiatan lintas batas yang bersifat legal maupun ilegal menjadi bagian dari dinamika sehari-hari. Di kawasan ini, sering terjadi penyelundupan barang dan narkoba, perdagangan manusia, pelintas batas ilegal, hingga potensi konflik antarwarga. Selain itu, tantangan geografis berupa medan yang berat, hutan lebat, dan keterbatasan infrastruktur, menambah beban pengelolaan perbatasan secara efektif dan berkelanjutan.

Bentangan perbatasan darat yang panjang dan berliku antara Kalimantan Barat dan negara bagian Sarawak, Malaysia, menghadirkan berbagai isu lintas batas. Mobilitas penduduk, kegiatan ekonomi informal, potensi penyelundupan, serta isu keamanan menjadi fenomena yang tak terhindarkan di kawasan ini. Dinamika ini menuntut adanya mekanisme pengelolaan perbatasan yang efektif dan komprehensif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia dan Malaysia menempuh pendekatan kerja sama bilateral, khususnya dalam bentuk pelaksanaan patroli terkoordinasi atau *coordinated border patrol* antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Patroli terkoordinasi ini dilaksanakan secara rutin dan bergilir oleh satuan pengamanan perbatasan dari kedua negara, sebagai bagian dari perwujudan komitmen untuk menjaga stabilitas, menanggulangi kejahatan lintas negara, serta memperkuat kepercayaan antar personel militer kedua pihak. Patroli terkoordinasi TNI–TDM bukan sekadar bentuk aktivitas militer, tetapi juga menjadi simbol diplomasi militer

dan kepercayaan strategis antara Indonesia dan Malaysia. Kegiatan ini mencerminkan confidence building measure (CBM) yang esensial dalam hubungan pertahanan bilateral. Melalui kerja sama ini, kedua negara tidak hanya menjaga integritas wilayahnya masing-masing, tetapi juga mengembangkan norma dan prosedur bersama untuk menghadapi tantangan lintas batas secara kolektif.

Pada tahun 2023-2024, penulis terlibat langsung dalam kegiatan pengamanan perbatasan di Kalimantan Barat sebagai bagian dari Satgas Pamantas RI-Malaysia. Pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana patroli terkoordinasi diimplementasikan di lapangan, termasuk prosedur operasional, koordiansi antar pasukan, serta tantangan teknis dan geografis yang dihadapi. Dari pengalaman tersebut, terlihat bahwa implementasi patroli terkoordinasi memiliki nilai strategis namun masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan logistik, komunikasi, hingga perbedaan pendekatan operasional antara kedua pihak.

Namun, dalam praktiknya, implementasi patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat tidak lepas dari sejumlah kendala. Tantangan operasional seperti perbedaan sistem komando, SOP militer, kemampuan logistik, serta hambatan bahasa dan budaya, kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor alam dan geografis yang ekstrem juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan. Koordinasi antar satuan, interoperabilitas sistem, dan keterbatasan infrastruktur menjadi isu-isu krusial yang perlu mendapat perhatian lebih dalam perumusan kebijakan perbatasan ke depan.

Dalam konteks tahun 2023-2024, kegiatan patroli terkoordinasi TNI-TDM di wilayah Kalimantan Barat mendapatkan perhatian khusus. Sebagai bagian dari Satgas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamantas) Yonif TNI AD, penulis secara langsung terlibat dalam pelaksanaan patroli tersebut. Pengalaman lapangan ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika operasional patroli terkoordinasi, mulai dari aspek perencanaan, komunikasi taktis, kendala logistik, hingga interaksi sosial dengan personel TDM dan masyarakat lokal. Dari pengalaman tersebut, penulis mencermati bahwa meskipun secara umum kerja sama ini berjalan positif, namun masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan, terutama dalam penguatan sistem koordinasi, standarisasi prosedur, serta pemanfaatan teknologi pemantauan.

Lebih jauh, kerja sama dalam patroli terkoordinasi ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari strategi pengelolaan perbatasan yang berbasis kolaborasi dan *mutual benefit*. Dengan melihat perbatasan tidak hanya sebagai garis pemisah, tetapi juga sebagai zona interaksi dan integrasi, maka pendekatan yang dibutuhkan bukan hanya keamanan tradisional (*hard security*), melainkan juga keamanan non-tradisional yang melibatkan unsur sosial, ekonomi, dan budaya.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam bagaimana kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam bentuk patroli terkoordinasi di Kalimantan Barat diimplementasikan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana efektivitasnya dalam mendukung tujuan keamanan perbatasan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan kebijakan perbatasan nasional dan kerja sama regional ke depan, serta memperkaya diskursus akademik dalam studi hubungan internasional, khususnya pada

dimensi kerja sama keamanan bilateral.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengkaji implementasi patroli terkoordinasi sebagai bentuk nyata kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dari sudut pandang operasional di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Pemahaman mendalam terhadap implementasi kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan pengelolaan perbatasan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KERANGKA ANALITIK

Teori Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan suatu bentuk hubungan antarnegara yang dibangun atas dasar kepentingan bersama, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan, perjanjian, atau mekanisme koordinatif lainnya. Menurut Robert O. Keohane (1984), kerja sama internasional merupakan hasil dari interdependensi antarnegara yang menyadari bahwa kolaborasi lebih menguntungkan dibanding konfrontasi dalam menyelesaikan isu-isu lintas batas.

Dalam konsep yuridis Romawi mengenai wilayah perbatasan, sesuai dengan isu yang berkembang pada saat itu sudah mencirikan adanya penetapan wilayah dan konsep Kerjasama sesuai dengan peraturan dan pemerintahan yang berkuasa. Konsep kerjasama dan penetapan batas ditentukan oleh kedua pihak yang bertetangga seperti yang diketahui dari definisi perbatasan adalah “*a definition of the border; a method of setting, delimiting and marking it; the papers drawn up by the neighbouring states stipulating the border line; the manner the state referred to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime*” (Aelenei, 2001: 112). Dalam perkembangannya, perbatasan tersebut dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang meliputi: 1. Mengelola dan mengawasi territorial status quo; 2. Mengawasi territorial kekuasaan dengan peraturan yang dipengaruhi wilayah lainnya. Pengertian border seringkali diartikan sebagai batas dari teritorial politik dan ruang tempat tinggal. Pada beberapa kasus, border memiliki arti yang lebih luas bagi kondisi politik dan ekonomi geografis dengan kasus tertentu untuk membagi kekuasaan atas wilayah yang berbatasan (Guo, 2005: 5). *Border area* atau dengan sinonim yang sama yaitu *cross-border area* secara luas berkaitan dengan heterogenitas spasial dalam istilah struktur ekonomi dan politik dengan terdiri atas dua atau lebih kekuasaan.

Konteks hubungan bilateral Indonesia–Malaysia, kerja sama dalam bentuk patroli terkoordinasi merupakan cerminan dari prinsip kerja sama keamanan yang saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling membutuhkan (*mutual need*). Patroli ini menjadi instrumen nyata dari diplomasi pertahanan, di mana militer kedua negara tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai penguat hubungan bilateral yang bersifat strategis.

Patroli terkoordinasi juga mencerminkan pendekatan realistik dalam hubungan internasional, yakni kerja sama yang dilandasi oleh kepentingan keamanan dan stabilitas wilayah. Dalam praktiknya, kerja sama ini membutuhkan kesepakatan teknis, kepercayaan antarlembaga militer, serta mekanisme evaluasi bersama yang terstruktur. Oleh karena itu,

teori kerja sama internasional menjadi landasan penting dalam menganalisis dinamika implementasi patroli terkoordinasi.

Teori Keamanan Non-Tradisional

Isu keamanan dewasa ini tidak hanya terbatas pada ancaman militer konvensional seperti perang antarnegara, tetapi juga meliputi berbagai ancaman non-tradisional yang bersifat kompleks dan sering kali lintas batas. Barry Buzan dan Ole Wæver dalam konsep sekuritisasi (*securitization*) menjelaskan bahwa ancaman terhadap negara dapat berupa persoalan ekonomi, lingkungan, sosial, hingga kejahatan transnasional seperti narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan. Konsep keamanan non-tradisional digunakan untuk menjelaskan ancaman yang tidak bersifat militer, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara. Menurut Buzan et al. (1998), keamanan non-tradisional mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang membutuhkan kerja sama lintas negara dan sektor.

Di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, ancaman-ancaman non-tradisional tersebut menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Aktivitas lintas batas yang tidak sah, baik oleh individu maupun kelompok, dapat mengganggu stabilitas wilayah dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, pendekatan keamanan non-tradisional dibutuhkan untuk memahami bahwa pengamanan wilayah perbatasan tidak cukup hanya dengan kehadiran militer, tetapi juga melalui pendekatan kolaboratif dan integratif antarnegara.

Patroli terkoordinasi dapat dipandang sebagai respons strategis terhadap isu-isu non-tradisional ini. Dengan adanya sinergi antara TNI dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM), pengawasan wilayah perbatasan dapat dilakukan secara bersama, sehingga deteksi dan penindakan terhadap kejahatan lintas batas menjadi lebih efektif. Konsep ini menjadi penting dalam mengkaji bagaimana kerja sama bilateral dapat memberikan solusi atas persoalan keamanan kontemporer.

Keamanan Perbatasan (*Border Security*)

Keamanan perbatasan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara. Konsep ini mencakup serangkaian tindakan, baik preventif maupun represif, yang bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengamankan wilayah perbatasan dari ancaman luar. Pengamanan perbatasan bukan hanya menjadi tugas negara secara unilateral, tetapi sering kali memerlukan kerja sama bilateral atau multilateral terutama ketika wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara lain.

Panjang wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia) sekitar 1200 km. Panjang garis perbatasan tersebut sebesar 70,58% berada di Provinsi Kalimantan Barat (847,3 km), serta melintasi lima daerah kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu yang meliputi 14 daerah kecamatan. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, namun juga rentan terhadap berbagai masalah, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan kerjasama antara kedua negara sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah ini.

Pada kawasan perbatasan Kalimantan Barat telah ditetapkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) resmi yang pertama (Entikong–Tebedu) di Kabupaten Sanggau yang dibangun pada tahun 1991 dan yang kedua dibangun di Nanga Badau–Lubuk Antu yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. PLBN itu merupakan bagian dari enam PLBN yang telah disepakati dengan pihak Sarawak untuk dibuka di perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak (Paloh, Sajingan Besar, Jagoibabang, Entikong, Jasa Karangas Kagau, dan Nanga Badau). Selain PLBN tersebut, terdapat pula pos lintas batas (PLB) yang tidak resmi, yaitu sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak. Hingga saat ini, yang telah disepakati kedua negara baru 10 buah desa di Kalimantan Barat dan 7 kampung lainnya di Sarawak.

Dalam konteks Indonesia–Malaysia, keamanan perbatasan menjadi isu strategis mengingat panjangnya garis batas di Kalimantan yang relatif terbuka dan sebagian besar masih berupa hutan atau jalur non-resmi. Hal ini menjadikan wilayah tersebut rawan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara. Oleh sebab itu, penguatan keamanan perbatasan menjadi sangat penting, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui patroli terkoordinasi.

TNI, melalui Satgas Pamtas (Pengamanan Perbatasan), memiliki peran utama dalam pelaksanaan patroli ini. Keberhasilan pengamanan wilayah perbatasan sangat ditentukan oleh koordinasi yang baik, pemetaan wilayah yang akurat, penguasaan medan, serta kesiapan logistik dan personel. Dengan adanya kerja sama langsung antara TNI dan ATM dalam patroli ini, maka pengawasan wilayah menjadi lebih efisien dan efektif.

Selain aspek operasional, konsep keamanan perbatasan juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi keamanan yang holistik. Namun, dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada aspek patroli militer terkoordinasi sebagai bentuk nyata dari kerja sama keamanan bilateral.

Teori Keamanan Nasional (*National Security*)

Keamanan nasional (*national security*) secara klasik didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan warga negaranya dari ancaman eksternal maupun internal. Konsep ini berkembang dari pendekatan militeristik menjadi pendekatan multidimensional yang mencakup ancaman non-militer seperti terorisme, penyelundupan lintas batas, migrasi ilegal, dan kejahatan transnasional. Harold Brown (1979), mantan Menteri Pertahanan AS, mendefinisikan *national security* sebagai:

“the ability to preserve the nation’s physical integrity and territory, to maintain its economic relations with the rest of the world on reasonable terms, and to preserve its nature, institutions, and governance from disruption from outside.”

Dengan demikian, *national security* tidak hanya soal pertahanan, tetapi juga ketahanan sosial-politik, ekonomi, dan diplomasi. Teori ini menekankan bahwa ancaman dan keamanan bersifat konstruktif terbentuk melalui interaksi sosial, sejarah, identitas, dan persepsi. Keamanan nasional dibentuk oleh cara negara memandang satu sama lain. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, yang memiliki sejarah kompleks, patroli terkoordinasi

bukan hanya soal militer, tetapi juga upaya membangun persepsi positif, saling percaya (mutual trust), dan menyamakan persepsi terhadap ancaman seperti illegal crossing, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara.

Melalui berbagai teori hubungan internasional dan konsep national security, dapat disimpulkan bahwa kerja sama patroli terkoordinasi antara Indonesia dan Malaysia bukan hanya respons terhadap ancaman fisik di wilayah perbatasan, tetapi juga bagian dari strategi membangun keamanan nasional secara kolaboratif. Analisis ini penting untuk memahami dinamika bilateral, kepentingan strategis, dan efektivitas pendekatan keamanan bersama dalam menghadapi ancaman modern yang bersifat kompleks dan lintas negara.

Berdasarkan pendekatan dan teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia melalui patroli terkoordinasi merefleksikan kombinasi kepentingan nasional dalam menjaga kedaulatan dan komitmen kerja sama kelembagaan melalui forum bilateral (neoliberal institutionalism). Kedua negara menyadari bahwa perbatasan merupakan wilayah yang rawan konflik dan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya militeristik, tetapi juga kolaboratif dan preventif.

Di sisi lain, konsep keamanan kooperatif dan rezim internasional menjelaskan bagaimana mekanisme operasional seperti patroli gabungan, pertukaran data, dan pelatihan bersama menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan timbal balik dan memperkecil potensi konflik. Perpaduan teori-teori ini menjadi fondasi kuat untuk membedah dinamika, tantangan, serta prospek keberlanjutan dari kerja sama bilateral dalam pengamanan perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena implementasi patroli terkoordinasi dari perspektif berbagai pihak yang terlibat, termasuk pengalaman peneliti sendiri yang pernah menjabat sebagai perwira seksi operasi selama satu tahun dari 2023 s.d 2024 di daerah penugasan pengamanan perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat. Pendekatan studi kasus dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks spesifik implementasi patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya, mengungkap secara rinci dinamika koordinasi antar institusi keamanan kedua negara, komprehensif mengenai proses, tantangan di lapangan, dan efektivitas pelaksanaan patroli berdasarkan pengalaman langsung saat bertugas di perbatasan.

Penggunaan metode kualitatif memungkinkan fleksibilitas dalam pengumpulan data dan analisis, sehingga peneliti dapat menggali informasi yang mendalam berdasarkan pengalaman pribadi dan perspektif informan lainnya. Pendekatan studi kasus akan memfokuskan pada implementasi patroli terkoordinasi sebagai unit analisis utama, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kontekstual yang relevan.

PEMBAHASAN

Analisis Kerja Sama Bilateral dalam Konteks Teori Hubungan Internasional

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks keamanan

perbatasan merupakan refleksi penting dari dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara. Wilayah perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak menyimpan berbagai persoalan kompleks, mulai dari kejahatan transnasional, pelintas batas ilegal, hingga potensi konflik kedaulatan. Dalam konteks ini, Patroli Terkoordinasi antara TNI dan Tentera Darat Malaysia (TDM) tidak hanya menjadi strategi pengamanan wilayah, tetapi juga mencerminkan bentuk nyata dari diplomasi pertahanan modern yang melibatkan sinergi antarnegara.

Analisis ini menggunakan pendekatan teori hubungan internasional, terutama teori neoliberalisme institusional, teori realisme defensif, serta teori kompleksitas interdependensi untuk menjelaskan bagaimana kerja sama bilateral dibentuk, dijalankan, dan dievaluasi. Penekanan diberikan pada peran masing-masing aktor keamanan, implikasi hubungan bilateral RI–Malaysia secara umum, serta capaian dan tantangan nyata dalam pelaksanaan patroli terkoordinasi sepanjang tahun 2023 hingga awal 2024.

Berdasarkan analisis peranan masing-masing aktor, TNI sebagai alat pertahanan negara, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat. Tugas ini diemban oleh satuan organik Kodam XII/Tanjungpura dan secara operasional oleh Batalyon Artilery Medan 16/Tumbak Kaputing. Dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI berperan dalam menjaga stabilitas wilayah, menghadapi ancaman non-tradisional seperti penyelundupan dan perlintasan ilegal, serta menunjukkan eksistensi negara di wilayah terluar.

Kehadiran TNI di garis depan tidak hanya dilihat sebagai kekuatan militer konvensional, tetapi juga sebagai aktor diplomatik yang menjalankan *defense diplomacy*. Dalam kerja sama dengan TDM, TNI menunjukkan profesionalisme melalui koordinasi lintas sektor, pelatihan bersama, dan adopsi sistem pelaporan gabungan. Melalui kehadiran yang aktif dan responsif, TNI memperkuat persepsi bahwa negara hadir dan melindungi masyarakat perbatasan, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan damai dan produktif dengan negara tetangga.

TDM, melalui Divisyon 1 Sarawak unit 13 RAMD, menjadi mitra utama TNI dalam pelaksanaan patroli. Mereka menunjukkan kapasitas operasional tinggi dengan disiplin tinggi, penguasaan wilayah, serta keahlian dalam pendekatan komunitas. TDM tidak hanya fokus pada keamanan fisik, tetapi juga memahami konteks sosial budaya masyarakat perbatasan. Dalam hal ini, TDM memandang bahwa keamanan tidak dapat dicapai semata-mata melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kepercayaan dan kemitraan dengan komunitas lokal. TDM menunjukkan sikap terbuka dalam diskusi teknis, pertukaran informasi, dan adaptasi SOP demi efektivitas patroli bersama. Peran mereka memperkuat *bilateral military confidence*, memperkecil potensi kesalahpahaman, dan memperluas ruang dialog strategis antara kedua negara.

Selain itu, dari unsur kelembagaan, Kementerian Pertahanan RI dan MINDEF Malaysia berperan sebagai pengarah strategis. Mereka merancang kebijakan, menetapkan kerangka kerja sama, dan mengawasi implementasinya melalui forum *General Border Committee* (GBC) dan *Border Committee Meeting* (BCM). Melalui forum ini, kedua negara membangun norma kerja sama, seperti penentuan zona patroli, prosedur keamanan bersama, serta penanganan insiden lintas batas. Selain aktor militer dan kementerian,

lembaga seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Pemerintah Daerah juga berperan. Mereka mendukung patroli melalui pengawasan sektor sipil, informasi intelijen lokal, serta bantuan logistik dan administratif. Pelibatan banyak aktor ini menunjukkan pendekatan *whole-of-government* dalam mengelola keamanan lintas batas, memperkuat *network governance* dalam teori hubungan internasional kontemporer.

Peneliti juga menganalisis mengenai implikasi kerja sama terhadap hubungan bilateral RI – Malaysia. Salah satu implikasi utama dari patroli terkoordinasi adalah meningkatnya kepercayaan strategis antara Indonesia dan Malaysia. Patroli bersama menunjukkan bahwa kedua negara memiliki niat baik untuk menjaga batas wilayah secara damai dan terkoordinasi. Ini sangat penting dalam konteks perbatasan yang masih berpotensi konflik, di mana beberapa segmen tapal batas darat belum terselesaikan sepenuhnya. Kepercayaan ini tumbuh seiring peningkatan interaksi militer, komunikasi langsung antar-komando, dan latihan bersama yang memungkinkan kedua pihak memahami budaya dan cara kerja satu sama lain. Dalam kerangka *confidence-building measures* (CBMs), patroli ini berfungsi sebagai mekanisme de-eskalasi dan pencegah konflik (*conflict prevention*), yang mengurangi risiko *incidents at sea* maupun *incidents on land*.

Kedua, kerja sama ini juga mencerminkan bentuk nyata dari diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*), di mana militer bertindak bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai agen hubungan luar negeri. Hubungan personel TNI dan TDM di lapangan membentuk “jaringan kepercayaan operasional” yang memperkuat fondasi hubungan bilateral. Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini memperlihatkan bahwa diplomasi pertahanan telah berkembang dari sekadar *military attaché* atau latihan gabungan, menjadi operasi nyata yang menghasilkan dampak strategis dan sosial. Konsep ini sejalan dengan pandangan teori neoliberalisme institusional, yang menyatakan bahwa hubungan antarnegara bisa dijaga dan diperkuat melalui institusi dan norma kerja sama.

Ketiga, patroli gabungan juga memberikan dampak sosial dan ekonomi positif. Dengan meningkatnya keamanan, masyarakat merasa lebih terlindungi dan aktivitas ekonomi berjalan lebih lancar. Penurunan kasus penyelundupan, perdagangan ilegal, dan kejahatan lintas batas juga memperkuat sistem hukum dan kepercayaan publik. Keamanan yang terjaga mendorong investasi lokal dan pembangunan infrastruktur. Bahkan, dalam beberapa kegiatan patroli, aparat gabungan juga ikut serta dalam kegiatan sosial seperti layanan kesehatan, distribusi bantuan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, yang turut meningkatkan citra positif militer kedua negara.

Adapun berdasarkan analisis peneliti, capaian nyata dari patroli terkoordinasi ini yaitu:

- a. Penurunan Aktivitas Ilegal. Berdasarkan laporan Kodam XII/Tanjungpura, terjadi penurunan sebesar 30–40% terhadap pelintas batas ilegal dan penyelundupan hasil hutan di sektor Jagoi Babang dan Badau.
- b. Koordinasi yang Lebih Efektif. Setelah beberapa gelombang patroli, terjadi peningkatan interoperabilitas antar-personel, terutama dalam hal komunikasi taktis, penentuan rute, dan pelaporan insiden. SOP gabungan mulai disusun dan diuji dalam simulasi patroli.

- c. Keterlibatan Komunitas: Masyarakat perbatasan mulai dilibatkan dalam pengawasan wilayah. Pendekatan ini disebut sebagai *community-based border security*, yang menjadi elemen penting dalam strategi pengamanan perbatasan kontemporer.
- d. Percepatan Resolusi Konflik Lapangan. Insiden kecil seperti kesalahpahaman antar-penduduk atau perbedaan interpretasi batas dapat segera diselesaikan karena kehadiran aparat dari kedua negara secara bersamaan di lapangan.

Patroli Terkoordinasi Indonesia–Malaysia tahun 2023–2024 bukan hanya contoh kerja sama militer, tetapi juga wujud nyata dari pendekatan strategis bilateral dalam mengelola perbatasan. Dalam konteks teori hubungan internasional, kerja sama ini mencerminkan keberhasilan pendekatan institusionalis, *complex interdependence*, dan *cooperative security*. Peran aktor keamanan, baik militer maupun sipil, menunjukkan integrasi pendekatan negara dalam menciptakan keamanan lintas batas. Implikasi positifnya tidak hanya terbatas pada keamanan, tetapi juga menyentuh stabilitas politik, diplomasi, ekonomi, dan sosial masyarakat di wilayah perbatasan. Capaian yang telah diraih memberi optimisme terhadap keberlanjutan kerja sama ini, namun tantangan struktural dan teknis harus segera direspons agar efektivitas patroli semakin meningkat. Penguatan teknologi, pembaruan SOP, dan pelibatan masyarakat secara lebih intensif akan menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini di masa depan.

Strategi dan Inovasi untuk Penguatan Kerja Sama Patroli Perbatasan RI – Malaysia

Wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat merupakan kawasan strategis yang menyimpan potensi konflik, baik dalam aspek militer, sosial, ekonomi, maupun kultural. Secara historis, perbatasan ini bukan hanya menjadi garis demarkasi kedaulatan dua negara, tetapi juga sebagai kawasan interaksi antar komunitas yang telah terjalin jauh sebelum pembentukan negara-bangsa modern. Dalam konteks keamanan kontemporer, wilayah perbatasan kini menghadapi ancaman non-tradisional seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, illegal logging, serta pelintas batas ilegal yang kompleks dan terorganisir.

Situasi tersebut menuntut respons kebijakan keamanan yang tidak lagi mengandalkan pendekatan konvensional berbasis *hard power* semata, melainkan mengedepankan kolaborasi dan inovasi antar aktor, baik dari unsur negara maupun non-negara. Salah satu wujud konkret dari upaya tersebut adalah pelaksanaan patroli terkoordinasi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentera Darat Malaysia (TDM). Dalam kerangka kerja sama bilateral ini, penguatan strategi dan inovasi menjadi penting untuk merespons dinamika ancaman perbatasan yang terus berkembang.

Paradigma keamanan non-tradisional (*non-traditional security*) berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan keamanan tradisional yang terlalu fokus pada ancaman militer antar negara. Dalam perkembangan hubungan internasional pasca-Perang Dingin, berbagai bentuk ancaman baru muncul, seperti perubahan iklim, krisis migran, penyelundupan manusia, hingga kejahatan lintas batas. Ancaman-ancaman ini tidak selalu berbentuk kekerasan bersenjata, namun memiliki dampak signifikan terhadap kedaulatan, stabilitas, dan kesejahteraan suatu negara.

Dari hasil observasi dan studi lapangan, terdapat sejumlah evaluasi dan tantangan dalam implementasi kerja sama patroli perbatasan, antara lain:

- a. Keterbatasan Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi. Banyak pos perbatasan belum terjangkau jaringan internet stabil, menghambat pelaporan daring dan koordinasi digital.
- b. Perbedaan Prosedur Operasional Standar (SOP). Walaupun *Technical Arrangement* telah dibuat, masih terdapat perbedaan dalam implementasi tindakan di lapangan.
- c. Kurangnya Pelibatan Masyarakat dalam Sistem Deteksi Dini. Potensi lokal belum dioptimalkan dalam pelaporan atau pengawasan berbasis komunitas.
- d. Ketergantungan pada Pendekatan Militeristik. Beberapa tindakan keamanan belum disertai dengan pendekatan pembangunan sosial dan ekonomi yang mendukung stabilitas jangka panjang.

Menurut Buzan dan Wæver (1998), keamanan non-tradisional meliputi dimensi sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan keamanan manusia. Dalam konteks wilayah perbatasan, ancaman non-tradisional tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan militeristik, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat sipil. Penerapan teori keamanan non-tradisional dalam kerja sama patroli perbatasan RI–Malaysia dapat dilihat melalui beberapa strategi berikut:

- a. Pendekatan Komunitas (*Community-Based Security*). Patroli terkoordinasi tidak hanya melibatkan TNI dan TDM sebagai aktor negara, tetapi juga mengintegrasikan masyarakat lokal sebagai mitra strategis. Dalam banyak kasus, masyarakat perbatasan memiliki akses terhadap informasi penting mengenai aktivitas ilegal. Penguatan kapasitas masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem deteksi dini dapat menurunkan risiko keterlambatan respons terhadap pelanggaran keamanan.
- b. Sistem Informasi Terpadu. Dalam menghadapi ancaman yang bersifat dinamis, dibutuhkan sistem informasi dan pelaporan yang cepat dan efisien. Penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan masyarakat, perangkat GPS, dan komunikasi digital antar pos perbatasan akan meningkatkan efektivitas patroli. Teknologi juga memungkinkan terciptanya database kejadian yang dapat menjadi bahan evaluasi berkala.
- c. Pendidikan Keamanan dan Literasi Hukum: Strategi jangka panjang yang relevan dengan pendekatan keamanan non-tradisional adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat perbatasan harus memahami aturan hukum perbatasan dan sanksi atas pelanggaran. Program literasi hukum melalui sosialisasi bersama TNI–TDM dapat menciptakan iklim hukum yang kondusif.
- d. Pemetaan Sosial dan Ekonomi Wilayah Perbatasan: Ancaman keamanan seringkali berkorelasi dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi keamanan harus disertai dengan kebijakan pembangunan perbatasan yang berkeadilan. Pengentasan kemiskinan, akses pendidikan, dan infrastruktur dasar adalah bagian dari jaminan keamanan

manusia yang perlu diperhatikan.

Dengan demikian, penerapan teori keamanan non-tradisional dalam kerja sama patroli perbatasan membuka ruang bagi pendekatan yang lebih menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan. Sedangkan, keamanan perbatasan (*border security*) merupakan konsep yang menekankan pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan sebagai entitas yang memerlukan tata kelola khusus, mengingat kompleksitas hubungan antar masyarakat dan negara yang terlibat. Newman (2006) menggarisbawahi bahwa perbatasan bukan hanya sekadar batas fisik, tetapi juga ruang sosial dan politik yang memerlukan pendekatan adaptif dan multidimensi. Dalam kerja sama patroli RI–Malaysia, penerapan teori keamanan perbatasan tercermin melalui beberapa aspek:

- a. Tata Kelola Adaptif (*Adaptive Border Management*). Keamanan perbatasan memerlukan kebijakan yang responsif terhadap dinamika lokal. Strategi ini mencakup fleksibilitas dalam perencanaan patroli, penggunaan data intelijen, dan rotasi personel berdasarkan intensitas risiko wilayah tertentu. Selain itu, pendekatan ini juga mengakui bahwa tidak semua wilayah membutuhkan perlakuan yang sama.
- b. Interoperabilitas Institusional. Salah satu tantangan utama dalam patroli terkoordinasi adalah perbedaan doktrin, struktur komando, dan SOP antara TNI dan TDM. Strategi yang dapat diterapkan adalah pelatihan bersama, pertukaran perwira penghubung, serta penyusunan prosedur gabungan yang disepakati bersama melalui mekanisme bilateral seperti *General Border Committee* (GBC).
- c. Pemanfaatan Teknologi Perbatasan. Patroli konvensional memiliki keterbatasan jangkauan dan kecepatan. Dengan memanfaatkan sistem pengawasan berbasis drone, kamera termal, sensor gerak, serta integrasi data lintas batas, TNI dan TDM dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan tanpa menambah beban personel.
- d. Pusat Komando Bersama (*Joint Command Center*): Salah satu bentuk implementasi kerja sama keamanan perbatasan adalah pembentukan posko bersama yang dilengkapi dengan peta digital, pelaporan daring, dan konektivitas langsung ke markas komando nasional masing-masing negara. Pusat komando ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan mempercepat koordinasi dalam menanggulangi insiden.
- e. Pelibatan *Multilevel Governance*. Tidak hanya institusi pertahanan, namun juga pemerintah daerah, imigrasi, bea cukai, dan aparat hukum perlu dilibatkan dalam pengelolaan perbatasan. Mekanisme kerja sama ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan mempercepat respons terhadap pelanggaran lintas batas. Penerapan teori keamanan perbatasan ini mendukung keberlanjutan dan efektivitas kerja sama patroli, sekaligus memperkuat legitimasi tindakan aparat di lapangan.

Selain pendekatan konseptual, strategi praktis dan inovasi operasional sangat diperlukan untuk menjawab tantangan nyata di lapangan. Beberapa strategi inovatif yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Segmentasi Wilayah Pengawasan Berdasarkan Risiko. Pembagian sektor patroli berdasarkan data intelijen memungkinkan pengaturan prioritas dan pengalokasian sumber daya secara tepat. Wilayah dengan potensi tinggi penyelundupan atau pelanggaran dapat menjadi zona merah yang diawasi lebih ketat.
- b. Komunikasi Enkripsi Lintas Negara. Untuk menghindari kebocoran informasi, komunikasi antara personel TNI dan TDM harus dilengkapi sistem enkripsi standar yang hanya dapat diakses oleh komando resmi.
- c. Platform Laporan Bersama. Pelaporan kejadian, pergerakan, dan hasil operasi perlu ditransformasikan ke dalam format digital yang dapat diakses kedua belah pihak. Aplikasi bersama yang mendukung foto, video, dan koordinat GPS dapat mempercepat verifikasi insiden.
- d. Latihan Taktis Gabungan (*Joint Border Exercises*). Selain patroli rutin, latihan bersama menghadapi skenario insiden lintas batas penting untuk meningkatkan kesiapan. Latihan ini juga menjadi media evaluasi dan penyelarasan SOP.
- e. Sistem Pengawasan Berlapis (*Layered Surveillance System*). Strategi ini melibatkan pengawasan dari udara (*drone*), darat (*personel patroli*), dan komunitas (informan lokal) secara simultan untuk menutup semua celah pergerakan ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk pelaksanaan Patroli Terkoordinasi TNI–TDM di wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat tahun 2023–2024 merupakan bentuk konkret dari sinergi pertahanan kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan menanggulangi ancaman lintas negara. Patroli Terkoordinasi yang dilaksanakan oleh TNI (melalui Kodam XII/Tanjungpura dan Yonarmed 16/Tumbak Kaputing) bersama Tentera Darat Malaysia (TDM) menunjukkan bahwa hubungan bilateral Indonesia–Malaysia telah memasuki tahap kematangan dalam aspek keamanan. Dalam perspektif hubungan internasional, kerja sama ini mencerminkan penerapan teori neoliberalisme institusional, interdependensi kompleks, dan pendekatan keamanan kooperatif, yang menempatkan kepercayaan dan kepentingan bersama sebagai landasan utama pengelolaan perbatasan.

Kerja sama ini berhasil menciptakan confidence-building measures (CBMs) melalui kehadiran aparat kedua negara secara langsung dan bersama-sama di sektor-sektor rawan, serta melalui komunikasi yang lebih terbuka antara komando satuan di lapangan. Kegiatan ini juga telah memberi dampak positif terhadap penurunan angka pelanggaran batas negara, peningkatan keamanan masyarakat lokal, dan penguatan interoperability antara personel TNI dan TDM. Namun, pelaksanaan patroli masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis, seperti perbedaan standar operasi prosedur (SOP), keterbatasan infrastruktur pengawasan, serta belum optimalnya integrasi data intelijen dan teknologi pemantauan modern. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam sistem deteksi dini dan sistem pelaporan belum berjalan secara maksimal, padahal peran komunitas sangat vital dalam konteks keamanan perbatasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa patroli terkoordinasi ini

bukan hanya sebagai langkah operasional semata, melainkan juga sebagai bentuk diplomasi pertahanan dan strategi keamanan bersama yang mampu meningkatkan stabilitas bilateral sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan perbatasan Kalimantan Barat yang strategis.

Patroli Terkoordinasi Indonesia–Malaysia merupakan bentuk kerja sama bilateral yang sangat strategis dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di perbatasan. Dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, kerja sama ini dapat menjadi model patokan bagi kerja sama keamanan perbatasan Indonesia dengan negara lain, serta sebagai pondasi penguatan defense diplomacy dan regional security architecture di kawasan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- (ASSEHR), volume 208: 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018)(pp. 63–67). Atlantis Press.
- Acharya, Amitav. (2014). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge University Press.
- Andreas, Peter. (2003). "Redrawing the Line: Borders and Security in the Twenty-First Century". *International Security*, 28(2), 78–111.
- ASEAN. (2003). *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*.
- Buzan, Barry. (1991). *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harvester Wheatsheaf.
- Conference on Social Sciences and Humanities (ICoSSH '08), 18-20 June 2008, Universiti Sains Malaysia, Penang.
Education and Humanities Research
- <https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/04/20/immigration-control-posts-in-pangalungan-and-bariocan-now-issue-cross-border-passes>.
- Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Little, Brown.
- Keohane, Robert O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Kodam XII/Tanjungpura. (2023). *Laporan Kegiatan Patroli Terkoordinasi RI–Malaysia Triwulan III 2023*.
- Newman, David. (2006). "Borders and Bordering: Towards an Interdisciplinary Dialogue." *European Journal of Social Theory*, 9(2), 171–186.
- Proceedings of Seminar on Nasional Resilience (SNAR 2010), Political Managements and Policies in Malaysia, 13-15 July 2010, Langkawi.
- Rebecca Chong. (2021, May 16). Once hugely promising barter trade business 'dying' in waters off Sarawak. The Vibes.
<https://www.thevibes.com/articles/news/27558/once-hugely-promising-bartertrade-business-dying-in-waters-off-Sarawak>.
- Rizal Zamani Idris, & Rafiq Idris. (2018). Chapter 2: Overview. Malaysia- Indonesia relations: An overview. In Rafiq Idris & Kasim Mansur (Eds.), Collection of studies on Sarawa Kalimantan economic relations towards greater economic

- interaction in Borneo. Right Book Publication.
- Rohani Hj. Ab Ghani, & Zulhilmi Paidi. (2010, July). MalaysiaIndonesia: Pengalaman hubungan dua negara serumpun. In
- Ruhanas Harun. (2006). Konflik dan kerjasama dalam hubungan Malaysia – Indonesia. In Ruhanas Harun (Ed.), Malaysia’s foreign relations. Issues and challenges. University of Malaya Press.
- Ruhanas Harun. (2014, May). Menyingkap hubungan Istimewa Malaysia- Indonesia: Antara keserumpunan dan kepentingan nasional. In Seminar on Peran Jalur Kedua Diplomasi dalam Hubungan Indonesia-Malaysia, Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kedah, Malaysia, 5-6 Mei 2014. Sintok.
- Shaharir Mohamad Zain. (2003). Penyebaran orang rumpun Melayu pra-Islam dan perkembangan tulisan bahasa Melayu. Sari, 21. 129–149.
- Shahriman Lockman. (2008). Improving Malaysia-Indonesia bilateral relations. ISIS Focus: Issue No. 188 & 189, January - June. Institute of Strategic and International Studies.
- Shamsul, A. B. (1996). Debating about identity in Malaysia: A discourse analysis.
- Sibirian, R. (2012). Kapuas Hulu (Perbatasan Badau) : Kawasan perbatasan Indonesia beraroma Malaysia. Jurnal Masyarakat & Budaya, 14(1), 53–
- Sinar Harian. (2021, November 21). Keselamatan, infrastruktur asas utama bandar sempadan Sarawak -Kalimantan. Sinar Harian.
<https://www.sinarharian.com.my/article/172171/EDISI/Keselamatan-infrastruktur-asas-utama-bandar-sempadanSarawak-Kalimantan>.
Southeast Asian Studies, 34(3), 8–31.
- Sukma, R. (2007, September 3). Relations with Malaysia require a realistic approach. The Jakarta Post.
- Sukma, Rizal. (2003). *Indonesia and Regional Security: Domestic Politics, Foreign Policy and Security Cooperation*. Routledge.
- Tanjung, Flores. (2019). Awareness of history nation Serumpun (Indonesia- Malaysia): Culture without borders. In *Advances in Social Science*,
- Taufik Ismail. (2021, October 3). Wilayah perbatasan mewakili wajah bangsa. Tribunnews.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/03/jokowi-wilayah-perbatasan-mewakiliwajah-bangsa>.
- The Star. (2022, April 20). Immigration control posts in Pangalungan and Bario can now issue cross border passes. The Star.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wahida, A., & Hendra Himawan, M. (2022, March). Batik in Malaysia and Indonesia: A collaboration for reconciling issues of cultural heritage. *International Journal of Education through Art*, 18(1), 89–103.
- Wardhani, B. L. S. W. (1999). Indonesia-Malaysia relations in the post confrontation era: The role of the serumpun concept. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 12(3-4), 25–44.
- Wardhani, B. L. S. W. (2008, June). Trends in Indonesia-Malaysia bilateral relations in

- post-Suharto period. In International
- Yong, J. L. C. (2003). Visions of 'Serumpun': Tun Abdul Razak and the golden years of Indo-Malay blood brotherhood, 1967-75. *Southeast Asia Research*, 11(3), 327–350.
- Yvonne Tuah. (2019, September 29). Enhancing access to Sarawak's trade. *Borneo Post*.
<https://www.theborneopost.com/2019/09/29/enhancing-access-to-sarawaks-trade/>